

IMPLEMENTASI KEMITRAAN KEHUTANAN DI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WAY TERUSAN

*The Implementation of Forest Partnership
in Production Forest Management Unit Way Terusan*

Yuni Ayu Wandira, Hari Kaskoyo, Indra Gumay Febryano, dan Slamet Budi
Yuwono

Jurusan Kehutanan
Fakultas Pertanian Universitas Lampung

ABSTRACT. *One of the government policies to increase community participation in forest management is Forestry Partnership. The purpose of this study was to determine the process of forestry partnership implementation in KPHP Way Terusan. Data collection used in this research was interviews and then the data is analyzed descriptively. The results showed that the implementation process of forestry partnership was long enough and have a lot of challenges. The supporting factors in forestry partnership were the existence of high support done by the community towards forestry partnership programs, communities high trust to KPHP Way Terusan and high support by other related parties (stakeholders). Inhibit factors in forestry partnership were low capabilities of human resources, the problems within farmer groups organization, maintainless communications between government and farmer groups and low community participation.*

Keywords: *farmer groups; forestry partnership; production forest management unit*

ABSTRAK. Salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan adalah Kemitraan Kehutanan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui proses implementasi Kemitraan Kehutanan di KPHP Way Terusan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi kemitraan kehutanan cukup panjang dan menemui banyak tantangan. Faktor pendukung kemitraan kehutanan yaitu adanya dukungan masyarakat yang tinggi terhadap program kemitraan kehutanan, kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada pihak KPHP Way Terusan, dan dukungan yang tinggi dari pihak lain (*stakeholder*) terkait. Faktor penghambatnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia, persoalan yang muncul dalam pengelolaan kelompok tani, kurang baiknya komunikasi antara pemerintah dan kelompok tani, dan partisipasinya masyarakat yang rendah.

Kata kunci: kelompok tani; kemitraan kehutanan; kesatuan pengelolaan hutan produksi

Penulis untuk korespondensi: indragumay@yahoo.com

PENDAHULUAN

Laju deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun (Sumargo *et al.*, 2011). Peningkatan laju tersebut disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya adalah aktivitas manusia. Menurut Handoko dan Darmawan (2014) penguasaan lahan yang dilakukan oleh manusia merupakan ancaman yang serius bagi keberadaan hutan. Departemen Kehutanan (2011) menyatakan bahwa penyerobotan kawasan hutan oleh masyarakat selama tahun 2010 mencapai luasan 67.595,85 ha. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan kebijakan pemerintah

memperkuat desentralisasi sektor kehutanan dan mengoptimalkan tata kelolanya (Hamzah, 2014).

KPHP Way Terusan berada di kawasan Hutan Produksi Register 47 yang secara administratif berada di Kecamatan Bandar Mataran Kabupaten Lampung Tengah. KPHP Way Terusan memiliki wilayah seluas ± 12.500 ha dan keadaan hutannya telah mengalami degradasi dan deforestasi. Sebesar 90% dari luas kawasan KPHP Way Terusan telah ditanami oleh masyarakat dengan tanaman karet dan singkong. Menurut Suryandari dan Alviya (2009) partisipasi aktif masyarakat dan berbagai *stakeholder* harus ditingkatkan dalam pembangunan KPH Way Terusan. Menurut

Syukur (2012) KPHP Way Terusan mewakili hampir semua permasalahan konflik di kawasan hutan di Indonesia.

Salah satu alternatif resolusi konflik yang dilakukan KPHP Way Terusan yaitu dengan membangun kemitraan dengan masyarakat yang berada dalam kawasan. Menurut Fadila, (2015), kemitraan mampu menjadi alternatif penyelesaian konflik antara pemegang izin dan masyarakat. Kemitraan kehutanan ini juga sebagai upaya untuk mengatasi masalah degradasi, deforestasi dan perambahan. Pola kemitraan dalam pengelolaan hutan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola hutan serta mencegah terjadinya konflik (Suprpto, 2014). Nawir (2011) menjelaskan sebagian besar masyarakat dalam program kemitraan telah menyadari bagaimana status hutan negara tidak dapat dikonversi. Kemitraan kehutanan antara pengelola hutan dengan masyarakat diharapkan menjadi solusi yang tepat dalam pengelolaan hutan. Penelitian tentang implementasi kemitraan kehutanan antara KPHP Way Terusan dengan kelompok tani penting dilakukan untuk mengetahui proses implementasi kemitraan antara kelompok tani dengan KPHP Way Terusan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Umbul Harapan Jaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, pada bulan Januari – Februari 2016. Umbul merupakan sebutan untuk pemukiman yang berada di dalam hutan. Wawancara dilakukan terhadap KPHP Way Terusan, kelompok tani di Umbul Harapan Jaya dan pihak lain (*stakeholder*). *Purposive sampling* dilakukan untuk pemilihan sampel dari pihak pengelola KPHP Way Terusan, *stakeholder* yang ikut terlibat meliputi pemerintah daerah, BP2HP, BP4K, akademisi (dosen Universitas Lampung) dan LSM Kawan Tani serta pengurus kelompok tani. *Random sampling* untuk anggota kelompok tani sebanyak 36 orang dari 187 orang, dimana jumlah *sampling*-nya ditentukan melalui formula Slovin (Arikunto, 2011). Data yang sudah terkumpul, selanjutnya dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Implementasi Kemitraan Kehutanan

Kawasan yang kini menjadi KPHP Way Terusan, sebelumnya merupakan Hutan Produksi Register 47. Kawasan tersebut sebelumnya tidak memiliki suatu unit pengelolaan. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab masyarakat mengokupasi kawasan hutan tersebut. Okupasi yang dilakukan oleh masyarakat mengancam keberadaan kawasan hutan. Hal ini terlihat dengan perubahan fungsi kawasan menjadi lahan perkebunan dan pemukiman. Pemerintah berusaha untuk mempertahankan keberadaan kawasan tersebut dengan membangun KPHP Way Terusan sebagai pengelola di tingkat tapak. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kartikasari (2014) bahwa ketiadaan pengelola di wilayah hutan berakibat pada kegiatan *illegal logging*, perambahan, dan okupasi kawasan hutan.

KPHP Way Terusan sebagai unit pengelolaan bertanggung jawab dalam mengelola sumberdaya hutan. Penyusunan rencana pengelolaan sumberdaya hutan oleh pihak KPHP Way Terusan harus memperhatikan keberadaan masyarakat di dalam kawasan untuk menghindari timbulnya konflik. Hal ini karena masyarakat sangat tergantung terhadap kawasan hutan. Menurut Bakhtiar *et al.* (2015) kawasan hutan KPHP Way Terusan sangat berharga bagi masyarakat yang hidup di dalamnya. Kondisi ini menjadikan potensi konflik antara pemerintah dan masyarakat sangat nyata. Masyarakat dengan segala upaya pemenuhan kebutuhannya menjadikan mereka akan melakukan apapun untuk mempertahankan kawasan tersebut. Menghadapi kondisi tersebut, KPHP Way Terusan berupaya bermitra dengan masyarakat dalam pengelolaannya. Program kemitraan kehutanan ini sesuai dengan visi KPHP Way Terusan yaitu “hutan produksi berbasis pemberdayaan masyarakat” dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Kemitraan Kehutanan.

Langkah KPHP Way Terusan dan BP2HP Wilayah VI Bandar Lampung dalam membangun kemitraan kehutanan dengan

masyarakat adalah dengan melakukan sosialisasi kemitraan pengelolaan hutan produksi bersama masyarakat dan pelatihan kader Masyarakat Mitra Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (MMPHPL). Sosialisasi yang dilakukan oleh KPHP Way Terusan mendapat respon baik dan buruk dari masyarakat. Masyarakat yang memberi respon yang baik hanya Umbul Harapan Jaya dari sepuluh umbul yang ada. Melihat respon baik tersebut, pihak KPHP Way Terusan memberikan sosialisasi, pelatihan, pembekalan dan pembinaan serta dilakukan pembentukan kelompok tani sehingga Umbul Harapan Jaya menjadi masyarakat yang bermitra dengan KPHP Way Terusan. Tahun 2015, KPHP Way Terusan mengembangkan program kemitraan dalam bentuk demplot ketahanan pangan dan energi berupa tumpang sari tanaman pangan dan tanaman kehutanan yang diterapkan menggunakan pola agroforestri dengan demplot seluas 10 ha. Tujuan dari demplot ini yaitu mendukung program pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan dan energi secara nasional.

Penandatanganan perjanjian kerjasama kemitraan kehutanan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2015 oleh kedua belah pihak yaitu KPHP Way Terusan dan Gapoktan Jati Makmur. Perjanjian juga ditandatangani oleh ketua-ketua kelompok tani di Umbul Harapan Jaya dan diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah dan kepala BP2HP Wilayah VI Bandar Lampung. Poin penting dalam perjanjian kerjasama yaitu pembiayaan kemitraan, hak dan kewajiban dan pembagian hasil. Pembagian hasil kemitraan demplot ketahanan pangan dan energi berupa tanaman padi untuk KPHP Way Terusan sebesar 30% dan untuk Gapoktan Jati Makmur sebesar 70%.

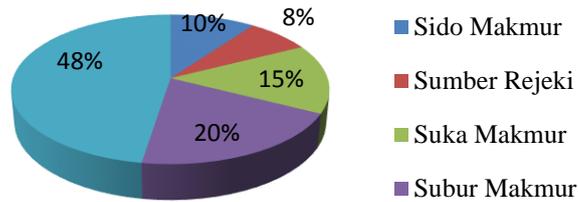
Implementasi Kemitraan Kehutanan

Kemitraan kehutanan merupakan salah satu strategi rencana bisnis KPHP Way Terusan dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai mitra usaha. Bentuk kemitraan yang dijalin KPHP Way Terusan dengan masyarakat adalah dengan pembuatan demplot ketahanan pangan dan energi seluas 10 ha. Pengelolaan yang

dilakukan KPHP Way Terusan masih belum mandiri sehingga diperlukan keterlibatan pihak lain (*stakeholder*) dalam implementasi kemitraan yang dibangun. Pihak – pihak tersebut antara lain Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah, BP4K, BP2HP, Tim Universitas Lampung dan LSM Kawan Tani serta masyarakat yang berada di dalam kawasan. Ekawati (2014) menyebutkan strategi yang perlu dilakukan KPH adalah sosialisasi konsep KPH ke seluruh *stakeholder*, meningkatkan kuantitas dan kapabilitas SDM, meningkatkan partisipasi masyarakat serta melakukan identifikasi potensi sumberdaya hutan di wilayahnya.

Penyusunan rencana demplot ketahanan pangan dan energi dilakukan oleh KPHP Way Terusan bersama *stakeholder*. Perencanaan tersebut terdiri dari penyusunan tujuan yang akan dicapai, rencana bisnis, penetapan kegiatan, pembiayaan, penetapan sistem monitoring dan sistem bagi hasil (*sharing*). Tujuan yang ingin dicapai dalam kemitraan demplot ini adalah meningkatkan produksi pangan. Penyusunan rencana bisnis dilakukan oleh Tim Universitas Lampung. Kegiatan yang dilakukan meliputi diskusi, pelaksanaan kegiatan seperti penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan. Pembiayaan kegiatan demplot menggunakan dana pemerintah yang dikelola oleh BP2HP dan petani pemilik lahan demplot. Sistem monitoring dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Sistem bagi hasil ditetapkan dengan kesepakatan antara KPHP Way Terusan selaku pemilik modal dan kelompok tani selaku pengelola lahan.

Perencanaan yang dilakukan oleh kelompok tani untuk demplot pangan dan energi yaitu lahan yang akan digunakan. Lahan yang digunakan yaitu lahan kelola masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani hutan. Luas lahan yang diperlukan untuk demplot ketahanan pangan dan energi seluas 10 ha. Langkah untuk mencukupi lahan yang dibutuhkan untuk demplot, maka masing-masing kelompok tani berdiskusi dan mendaftarkan luas lahan kelompok yang bisa digunakan. Kelompok tani yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini hanya lima kelompok dari tujuh kelompok yang ada.



Gambar 1. Persentase Sebaran Luas Lahan Demplot Ketahanan Pangan dari Setiap Kelompok Tani Hutan di Umbul Harapan Jaya

Jenis dan jumlah bibit yang akan ditanam ditentukan oleh KPHP Way Terusan dan BP2HP. Jenis padi yang digunakan dalam demplot ini adalah sibagundut. Pola tanam demplot yang digunakan adalah pola agroforestri yang merupakan pengelolaan lahan yang tepat untuk KPHP Way Terusan. Tim Universitas Lampung yang berperan sebagai konsultan memberikan beberapa pola agroforestri yang dapat digunakan oleh petani. Permintaan bibit tanaman kehutanan yang diminta petani belum terpenuhi. Pengajuan permintaan sudah dilakukan dua kali, permintaan bibit yang pertama sudah dikirim ke Kantor Resort KPHP Way Terusan. Bibit yang dikirim tidak sesuai dengan permintaan petani. Bibit permintaan pertama ditanam di lahan kelola pribadi petani, sehingga untuk kemitraan demplot ketahanan pangan dan energi yang dilaksanakan saat ini belum menerapkan pola agroforestri dan hanya ditanami padi. Permintaan bibit yang kedua sudah dilakukan dan masih menunggu ketersediaan bibit di persemaian permanen milik BPDAS. Gapoktan Jati Makmur juga memiliki persemaian di halaman belakang kantor KPHP Way Terusan.

Penyiapan lahan dilakukan dengan pembukaan dan pengolahan lahan yang sebelumnya ditanami dengan komoditi karet dan singkong sehingga perlu dilakukan pembukaan lahan. Pengelolaan lahan dilakukan dengan pembajakan secara mekanis menggunakan traktor. Biaya untuk menyewa jasa pembajakan tersebut sebesar Rp 650.000/ha. Sumber dana untuk menyewa traktor berasal dari dana yang dikelola oleh BP2HP sebesar Rp 200.000/ha dan petani pemilik lahan demplot. Lahan yang telah selesai dibajak kemudian digaru agar tanah lebih rata dan pembuatan lubang tanamnya dilakukan sebelum kegiatan penanaman.

Instruksi penanaman disosialisasikan oleh pihak KPHP Way Terusan. Penanaman dilakukan secara bergotong royong dengan melibatkan pemilik lahan demplot dan anggota kelompok lainnya, namun tidak seluruh anggota kelompok tani berpartisipasi dalam kegiatan penanaman tersebut. Bentuk kontribusi yang diberikan anggota kelompok dalam kemitraan hanya dalam penanaman, sementara pemeliharaan tanaman mulai dari pemupukan, penyiangan dan penyemprotan dilakukan oleh pemilik lahan demplot atau dengan membayar tenaga buruh.

Kegiatan monitoring dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Monitoring secara langsung dilakukan oleh pihak KPHP Way Terusan dengan menempatkan tiga tim bakti rimbawan secara berkala di kantor resort KPHP Way Terusan yang bertempat di Umbul Harapan Jaya. Monitoring secara tidak langsung dilakukan dengan sistem koordinasi. Petani pemilik lahan demplot melaporkan ke ketua kelompok, kemudian dilaporkan ke ketua gapoktan. Laporan yang telah terkumpul di ketua gapoktan kemudian disampaikan kepada pihak KPHP Way Terusan. Hasil monitoring yang telah terkumpul di Kepala KPHP Way Terusan kemudian disampaikan kepada pihak BP2HP selaku badan yang fungsi sebagai badan yang mengontrol teknis di lapangan. BP2HP yang berperan sebagai pemberi masukan kepada KPHP bersama-sama mendiskusikan solusi yang harus dilakukan. Hasil dari diskusi kemudian disampaikan kepada ketua gapoktan, kemudian disampaikan kepada ketua kelompok untuk disampaikan kepada pemilik lahan demplot.

Masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kemitraan demplot ketahanan pangan dan energi ini adalah tanaman padi tumbuh kerdil dan berwarna kuning kemerah-merahan. Penyebab menguningnya

tanaman padi adalah adanya serangan hama dan penyakit yang dipengaruhi oleh waktu penanaman yang terlambat. Hama tersebut adalah wereng, ulat dan belalang. Mengatasi masalah tersebut, BP2HP memberikan fungisida dan insektisida kepada petani pemilik lahan demplot untuk melakukan pengendalian terhadap hama dan penyakit. Pemilik lahan demplot juga mengeluarkan biaya untuk penyemprotan, selain menggunakan fungisida dan insektisida dari bantuan, pemilik lahan juga membeli menggunakan dana pribadi. Petani yang mengeluarkan dana pribadi lebih banyak, tanaman padinya memiliki kondisi yang lebih baik dibandingkan petani lainnya. Selain serangan hama dan penyakit, penyebab timbulnya masalah tersebut adalah lahan yang digunakan merupakan lahan bekas tanaman singkong sehingga memiliki unsur hara yang sedikit sehingga mempengaruhi pertumbuhan tanaman padi. Hal ini dikarenakan pemupukan yang dilakukan kurang mengembalikan kesuburan tanah karena menggunakan pupuk kompos yang lebih banyak dibanding pupuk kimia.

Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Kemitraan Kehutanan

Implementasi kemitraan kehutanan antara pihak KPHP Way Terusan dengan kelompok tani dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor – faktor yang pendukung terjalannya kemitraan kehutanan yaitu:

1. Dukungan masyarakat yang tinggi terhadap program kemitraan
Berdasarkan persentase tentang dukungan masyarakat terhadap program kemitraan kehutanan didapatkan nilai sebesar 100%. Dukungan ini dipengaruhi oleh berbagai alasan seperti pendapat tentang kemitraan, adanya harapan dan keinginan, program kemitraan merupakan program pemerintah, masyarakat menyadari status kawasan yang mereka tempati dan masyarakat melihat pengalaman di daerah lain.
2. Kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada pihak KPHP Way Terusan
Kepercayaan masyarakat Umbul Harapan Jaya merupakan faktor pendorong implementasi kemitraan kehutanan ini. Sebesar 97% masyarakat percaya dan 3%

masyarakat belum percaya kepada pihak KPHP Way Terusan.

3. Dukungan yang tinggi dari pihak lain (*stakeholder*) terkait
Adanya pihak-pihak lain (*stakeholder*) membantu dalam implementasi kemitraan kehutanan. Hal ini dikarenakan pihak-pihak tersebut memiliki peran sebagai fasilitator yang dapat mendukung terjalannya kemitraan kehutanan antar KPHP Way Terusan dengan kelompok tani. *Stakeholder* yang terlibat dalam kemitraan ini antara lain Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah, BP2HP. Unila berperan sebagai tim pakar, BP4K berperan dalam peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan LSM Kawan Tani berperan sebagai pendamping kelompok tani. Hal ini sesuai dengan penjelasan Alviya dan Suryandari (2008) bahwa campur tangan seluruh pemangku kepentingan terkait sangat dibutuhkan dalam pembangunan KPHP Way Terusan.

Faktor – faktor yang penghambat terjalannya kemitraan kehutanan antara lain:

1. Sumberdaya manusia yang rendah
Sumberdaya manusia Umbul Harapan Jaya dikategorikan rendah karena pendidikan masyarakat Umbul Harapan Jaya sebesar 69% adalah lulusan Sekolah Dasar (SD) sehingga kemampuan dalam menerima informasi dan program untuk perubahan sangat sulit diterima oleh masyarakat.
2. Permasalahan dalam organisasi kelompok tani
Kelompok tani yang terbentuk di Umbul Harapan Jaya merupakan respon masyarakat terhadap program kemitraan kehutanan di Umbul Harapan Jaya. Pemilihan pengurus dilakukan secara bermusyawarah dan ditunjuk oleh koordinator. Kepengurusan inilah yang kemudian menjadi masalah dalam kelompok. Pengurus hasil penunjukan dari koordinator menjadi kurang merasa memiliki tanggung jawab dan anggota tidak menghargai keberadaan pengurus karena merasa tidak memilihnya sebagai pengurus. Keadaan ini menjadikan lembaga kelompok tani menjadi pasif sehingga komunikasi dan hubungan yang terjalin lemah. Menurut Bowo *et al.* (2011) kepengurusan yang

terbentuk relatif lebih baik akan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan anggota terhadap kepengurusan.

3. Komunikasi antara pihak pemerintah dan masyarakat yang kurang baik Komunikasi dianggap menghambat program kemitraan dikarenakan adanya permasalahan yang berhubungan dengan komunikasi. Permasalahan yang terjadi adalah informasi yang diterima masyarakat tentang program kemitraan masih simpang siur. Hal ini terlihat dari masyarakat yang resisten terhadap pemerintah setelah sosialisasi pertama tentang penyampaian program Kemitraan Kehutanan.
4. Rendahnya Partisipasi anggota kelompok tani Rendahnya partisipasi masyarakat terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kemitraan. Partisipasi masyarakat pada kegiatan perencanaan berupa kehadiran saat rapat, pertemuan dan sosialisasi. Kegiatan pelaksanaan berupa keterlibatan masyarakat pada kegiatan penanaman dan pemeliharaan. Partisipasi yang rendah menyebabkan terhambatnya suatu implementasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Elizabeth (2008) bahwa kebijakan publik dalam pembangunan dapat berhasil atau gagal akan sangat tergantung kepada partisipasi masyarakatnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Proses implementasi kemitraan kehutanan di KPHP Way Terusan berjalan cukup panjang. Kemitraan kehutanan merupakan strategi bisnis KPHP Way Terusan yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya. Kemitraan yang telah dijalin antara kelompok tani dan KPHP Way Terusan yaitu kemitraan demplot ketahanan pangan dan energi seluas 10 ha menggunakan sistem agroforestri, tetapi saat ini tanaman di lahan demplot masih berupa tanaman padi. Walaupun jangka waktunya hanya satu tahun, namun dapat dilanjutkan sesuai kesepakatan. Program kemitraan kehutanan melibatkan pihak lain seperti Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas

Kehutanan dan Perkebunan Lampung Tengah, BP2HP, BP4K, Tim Universitas Lampung dan LSM Kawan Tani dalam mendukung program kemitraan kehutanan dengan masyarakat. BP2HP mengelola segala bentuk pengelolaan yang berhubungan dengan dana dan bersama dengan KPHP Way Terusan bertanggung jawab terhadap program kemitraan yang dilaksanakan. BP4K, Tim Universitas Lampung dan LSM Kawan Tani berperan sebagai fasilitator untuk mendukung terselenggaranya kemitraan kehutanan. Kelompok tani hutan sebagai mitra usaha KPHP Way Terusan sebagai pelaksana teknis di lapangan yang mengelola lahan.

Saran

Program kemitraan kehutanan harus dipersiapkan lebih matang demi keberhasilan program tersebut. Persiapan tersebut meliputi kesiapan pihak KPHP Way Terusan sebagai pengelola kawasan dan masyarakat sebagai mitra usaha yang menggarap lahan. Kapabilitas sumberdaya masyarakat mitra harus ditingkatkan dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat mitra dalam pembinaan, pelatihan dan sosialisasi. Program kemitraan kehutanan merupakan program yang berbasis masyarakat sehingga merupakan perpaduan pendekatan perencanaan secara *top down* dan *bottom up*. Penelitian selanjutnya perlu diteliti tentang evaluasi demplot ketahanan pangan dan energi dan sistem bagi hasil dari kemitraan kehutanan yang terjalin.

DAFTAR PUSTAKA

- Alviya, I. & Suryandari, E.Y. 2008. Kajian konsep kesatuan pengelolaan hutan model Way Terusan Register 47. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 5(2):101–120.
- Arikunto, S. 2011. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bakhtiar, I., Sanyoto, R., Berliani, H. Suwito & Hardiyanto, G. 2015. *Upaya KPH Mengurai Sengketa, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Kemitraan.

- Bowo, C., Supriono, A., Hariyono, K., & Kosasih, S. 2011. Dinamika kelembagaan kelompok tani hutan rakyat lahan kering di Desa Tambak Ukir Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 5: 31-38.
- Departemen Kehutanan. 2011. *Pemantauan Hutan di Indonesia*. Jakarta: Departemen Kehutanan RI.
- Ekawati, S. 2014. Pembangunan KPH di Indonesia. Dalam: B. Hernowo, S. Ekawati (Eds.) *Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Langkah Awal Menuju Kemandirian*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Elizabeth, R. 2008. Restrukturisasi manajemen sumberdaya agraria hutan: Solusi konflik tenurial hutan atau meminggirkan keberadaan masyarakat sekitar hutan dan kearifan lokal? *Buletin Planolog*, 4(1): 31-40.
- Fadila I 2015. Kemitraan Kehutanan: Regulasi Perlu Diperbaiki. *Bisnis Indonesia*. 25 Juni 2015.
- Hamzah. 2014. Implementasi kebijakan pembentukan organisasi pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Berau Barat di Kabupaten Berau. *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi*, 1(3): 26–38.
- Handoko & Darmawan, A. 2015. Perubahan tutupan hutan di Taman Hutan Raya Wan Abdulrachman (Tahura WAR). *Jurnal Sylva Lestari*, 3(2): 43 – 52.
- Kartikasari, G. 2014. Pembelajaran Pengelolaan Hutan di Empat Negara (Jerman, Swiss, India dan Canada. Dalam: B. Hernowo, S. Ekawati (Eds.) *Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Langkah Awal Menuju Kemandirian*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2013. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
- Nawir, A.A. 2011. Satu dasawarsa perjalanan kemitraan masyarakat - perusahaan HTI di Indonesia: Studi kasus Finnantara Intiga, Sanggau, Kalimantan Barat. *Jurnal Kehutanan Masyarakat*, 3(1): 6–31.
- Sumargo, W., Nanggara, S.G., Nainggolan, F.A. & Apriani, I. 2011. *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000-2009*. Bogor: Forest Watch Indonesia.
- Suprpto, E. 2014. Kemitraan kehutanan di Jawa Barat-Banten. *Policy Paper Arupa*, 1: 1–22.
- Suryandari, E.Y. & Alviya, I. 2009. Kendala dan strategi implementasi pembangunan KPH Rinjani Barat. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 6(1): 1–14.
- Syukur, M. 2012. *Resolusi Konflik di KPH: Pembelajaran dari KPH Register 47 & Rinjani Barat*. Bogor: Working Group Tenure.